



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KOTA  
LAMA SEMARANG SEBAGAI CAGAR BUDAYA DALAM PERSPEKTIF  
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

**Disusun Oleh :**

**Nabilla Riestha Safa Tahrani**

**221003742019138**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KOTA LAMA  
SEMARANG SEBAGAI CAGAR BUDAYA DALAM PERSPEKTIF PEMBAGIAN  
URUSAN PEMERINTAHAN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
NABILLA RIESTHA SAFA TAHRANI  
NPM : 221003742019138

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. SUROTO, S.H., M.HUM  
NUPTK : 4735737638130092

Anggota,

YASMININGRUM, SH., MHUM  
NUPTK : 7556738639230073

Anggota,

SUMARTINI DEWI, SH., MHUM  
NUPTK : 1640744645230082

Mengetahui  
Dekan,



PROF. DR. EY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>vv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	12
C. Perumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Teori Negara Hukum dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Cagar Budaya .....	17
B. Teori Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan .....	18
C. Teori Pembagian Urusan Pemerintahan (Urusan Absolut dan Konkuren) .	19
D. Teori Pelestarian Cagar Budaya .....	19
E. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).....	20
F. Teori Efektivitas Hukum .....	21
G. Tinjauan Hukum Tata Negara di Indonesia.....	21
H. Konsep Dasar Hukum Tata Negara Dan Pembagian Urusan Pemerintahan	22
I. Landasan Teori .....	23
1. Teori Hukum Tata Negara .....	23
2. Teori Pembagian Urusan Pemerintahan .....	24
3. Teori Pengelolaan Cagar Budaya .....	25

4. Asas untuk Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang .....	25
5. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Khususnya Kota Lama Semarang	27
6. Perspektif Pembagian Urusan Pemerintahan .....	27
J. Kerangka Pemikiran .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Tipe Penelitian .....	29
B. Spesifikasi Penelitian .....	29
C. Sumber Data .....	30
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
E. Metode Penyajian Data .....	32
F. Metode Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....</b>	<b>35</b>
<b>A. Kendala Dan Tantangan Serta Upaya Harmonisasi Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kota Lama Semarang. ....</b>	<b>42</b>
1. Kendala dalam Pembagian Kewenangan.....	42
2. Tantangan dalam Perspektif Hukum Tata Negara.....	42
3. Upaya Harmonisasi Kewenangan.....	43
4. Implikasi .....	43
5. Pendalaman Pembagian Kewenangan dalam Perspektif Hukum Tata Negara.....	43
6. Pendalaman Kendala dan Harmonisasi, dan Implikasi Pengelolaan dalam Perspektif Hukum Tata Negara .....	44
<b>B. Pembagian Kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang Sebagai cagar budaya berdasarkan perspektif hukum tata negara .....</b>	<b>48</b>
1. Kewenangan Normatif Pemerintah Pusat dalam Penetapan Standar Pelestarian Cagar Budaya .....	49
2. Peran Koordinatif Pemerintah Provinsi Dalam Urusan Kebudayaan yang Bersifat Regional.....	49
3. Kewenangan Operasional Pemerintah Kota dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan .....	50
C. Analisis Sumber Kewenangan: Atribusi, Delegasi, dan Mandat .....	50
D. Analisis Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan .....	50
E. Dimensi Hak Konstitusional Atas Kebudayaan .....	51
F. Analisis Potensi Sengketa Kewenangan.....	52

G. Analisis Terhadap Efektivitas Hukum Dalam Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang .....	53
<b>BAB VPENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

## ABSTRAK

Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang sebagai cagar budaya merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dalam kerangka pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Kawasan ini memiliki nilai historis dan kultural yang strategis sehingga memerlukan pengaturan dan pengelolaan yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan dalam pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang serta mengkaji kendala dan upaya harmonisasi antar tingkat pemerintahan dalam perspektif urusan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan pemerintahan daerah dan cagar budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan dilaksanakan berdasarkan sistem urusan pemerintahan konkuren, di mana pemerintah pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemerintah provinsi berperan dalam koordinasi dan pengawasan, serta pemerintah kota melaksanakan kewenangan operasional. Kendala yang dihadapi meliputi tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan dan penguatan sinergi antar tingkat pemerintahan guna mewujudkan pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan.

*Kata Kunci: pembagian kewenangan, urusan pemerintahan konkuren, cagar budaya, urusan pemerintahan.*

## ***ABSTRACT***

The management of the Kota Lama Semarang area as a cultural heritage site constitutes part of governmental affairs in the field of culture within the framework of the distribution of authority among the central government, provincial government, and municipal government. As an area possessing significant historical and cultural value, its management requires an integrated regulatory and administrative approach. This research aims to analyze the division of authority in managing the Kota Lama Semarang area and to examine the obstacles and harmonization efforts among different levels of government from the perspective of governmental affairs. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including legislation related to regional government and cultural heritage, as well as secondary legal materials such as relevant legal literature and doctrines. The results indicate that the management of the area is implemented under the system of concurrent governmental affairs, in which the central government establishes norms, standards, procedures, and criteria; the provincial government performs coordinating and supervisory functions; and the municipal government exercises operational authority. The main challenges include overlapping authority and suboptimal coordination. Therefore, policy harmonization and strengthened intergovernmental synergy are necessary to ensure effective and sustainable management.

*Keywords: division of authority, concurrent governmental affairs, cultural heritage, governmental affairs.*